



Ringkasan bagi Pengambil Keputusan

Transisi Kelautan: Hal yang Perlu Dipelajari dari Transisi Sistem

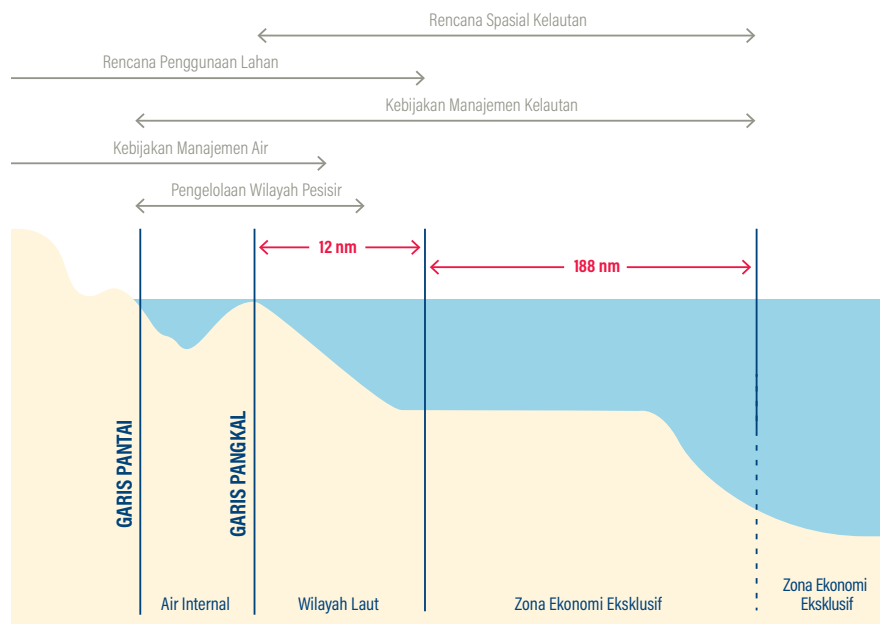
Indikator kritis mengungkapkan bahwa bisnis yang mengabaikan lautan akan mengakibatkan runtuhnya fungsi penting lautan, yang akan berdampak besar bagi ekonomi, masyarakat, dan penduduk global. Diperlukan adanya hubungan baru antara umat manusia dan lautan untuk menjamin kelangsungan beragam peran pendukung kehidupan yang disediakan oleh lautan.

Wawasan baru tentang hubungan kompleks antara berbagai ekosistem telah berkontribusi pada pengembangan kesadaran, sehingga dibutuhkan pendekatan lebih holistik terhadap tata kelola lautan. Sistem tata kelola lautan saat ini terpecah di berbagai batas dan sektor administratif, sehingga mencegah adanya tanggapan terpadu yang diperlukan untuk mengatasi peningkatan dan limpahan risiko akibat aktivitas manusia, seperti penangkapan berlebihan dan polusi plastik, serta perubahan terkait iklim di lautan (Gambar 1).

Transformasi ke ekonomi lautan berkelanjutan akan memerlukan penyusunan struktur tata kelola baru yang memungkinkan pengelolaan lautan secara holistik.

Makalah baru yang mendukung High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy¹, langsung menanggapi tantangan ini dengan mempertimbangkan pengaturan tata kelola yang akan memfasilitasi pengelolaan lautan secara lebih baik sebagai barang milik bersama. Makalah ini menganalisis kondisi yang telah memfasilitasi transisi sosial di masa lampau, dan pengaturan tata kelola yang telah mengizinkannya. Mereka juga mempertimbangkan transisi sistem yang telah terjadi di tingkat lokal, regional, dan global.

Gambar 1. Kerangka Manajemen Independen dan Tumpang Tindih pada Sistem Sumber-ke-Laut di Swedia



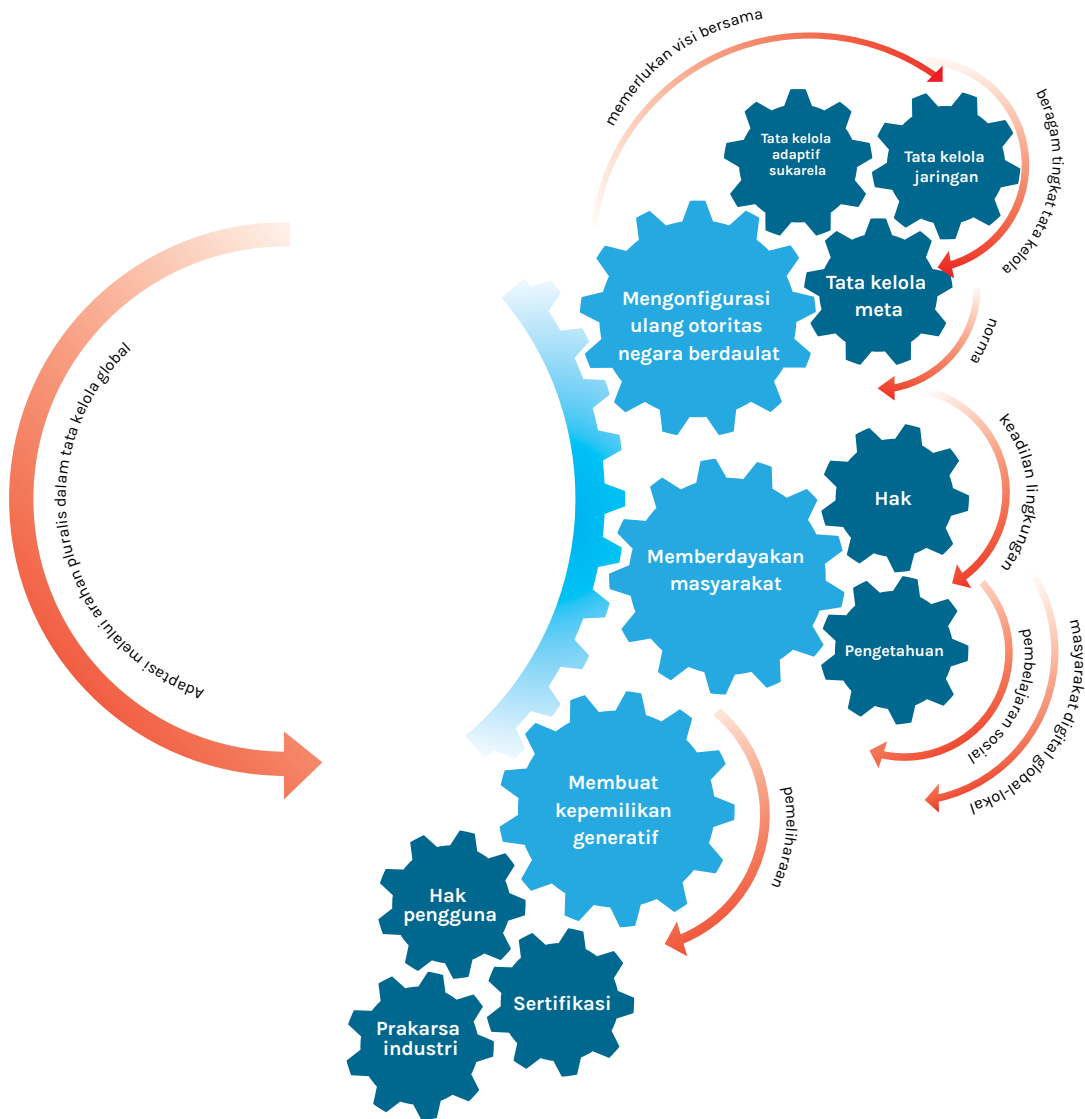
Sumber: Dari Mathews dkk. 2019.

Untuk menciptakan teori perubahan tata kelola laut, digunakan kerangka untuk mempertimbangkan unsur berikut:

- **Dasar tata kelola:** Menguraikan peraturan tata kelola laut saat ini.
- **Dinamika laut:** Mengidentifikasi pemangku kepentingan berdasarkan sektor dan menjelaskan dinamika dalam sektor utama ekonomi kelautan.
- **Pendorong perubahan:** Mengidentifikasi sifat perubahan yang merusak stabilitas sistem (emisi gas rumah kaca, penangkapan ikan berlebih, penggunaan dasar laut dan lahan, serta tata kelola yang lemah).
- **Inovasi khusus:** Menguraikan cara sistem laut berkembang dengan memusatkan perhatian terhadap tren saat ini yang diterapkan dalam tata kelola laut (seperti manajemen berbasis ekosistem untuk perencanaan pengembangan dan manajemen risiko bencana, manajemen perikanan berbasis hak, pemeliharaan bersama dalam bisnis, inovasi pemantauan penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur, keterbukaan rantai pasokan, dan keadilan dalam keberlanjutan laut).
- **Dinamika transisi:** Menyarankan jalur ke depan jelas, dengan contoh tindakan yang diambil pada tingkat lokal, nasional, regional, dan global, yang menunjukkan keberhasilan transisi.

Transisi ke tata kelola lautan yang mempertimbangkan kompleksitas sistem lautan akan membutuhkan perpaduan gaya tata kelola, termasuk kebijakan supranasional dan pedoman normatif, kerangka adaptif dan fleksibel, serta pemeliharaan bawah-ke-atas. Makalah ini mengajukan serangkaian komponen tata kelola dan proses yang akan menghasilkan kerangka tata kelola kelautan global untuk memfasilitasi transisi berkelanjutan dalam sistem kelautan yang kompleks (Gambar 2).

Gambar 2. Elemen yang Menyampaikan Transisi menuju Tata Kelola Kelautan Global yang Efektif



Sumber: Penulis, elemen konseptual diambil dari Bollier 2016.

Kesempatan untuk bertindak

Untuk menjalankan transisi, makalah tersebut menyarankan empat peluang bertindak umum yang dapat berkontribusi pada transisi dalam proses, serta memulai serangkaian proses dan dinamika baru yang sesuai dengan kompleksitas manajemen serta tata kelola kelautan:

1. Mendukung Proses Kelautan PBB

Mendukung pengesahan oleh negara-negara di luar pihak perjanjian UNCLOS

Mendorong pengesahan, implementasi, dan operasi BBNJ pada tingkat nasional, sesegera mungkin, namun selambat-lambatnya pada 2025

Mengesahkan, menerapkan, dan melokalisasi Pakta Global (atau Konvensi PBB serupa) sesegera mungkin, namun selambat-lambatnya pada 2025

Mendukung prakarsa PBB lainnya, seperti UNEP, Komunitas Aksi Kelautan, Komitmen Sukarela Konferensi Kelautan

2. Membuat Tata Ekologi Baru

Membangun 'lembaga kelautan' supranasional baru untuk mendukung proses dan dinamika transisi yang diprakarsai, mengembangkan norma untuk memandu proses transisi, merancang kerangka fleksibel dan adaptif yang mempertimbangkan masalah kontekstual lokal dengan kapasitas yang memadai untuk adaptasi variasi dalam penggerak sistem, dan memungkinkan pengembangan berkelanjutan

Memperkuat tata kelola yang mencerminkan kesukarelaan dengan meningkatkan pelaporan mengenai komitmen sukarela nasional, pemantauan, dan koordinasi komitmen

Mendorong negara berdaulat untuk memfasilitasi model tata kelola polisentris yang berpedoman pada prinsip-prinsip atas-ke-bawah umum, namun didukung oleh pengambilan keputusan mengenai penggunaan sumber daya bawah-ke-atas

3. Berkontribusi bagi Masyarakat yang Berdaulat

Pengakuan global atas hak asasi manusia terhadap lingkungan dengan ekologi yang baik

Pembentukan kapasitas untuk meningkatkan keragaman pemimpin dari skala lokal hingga global, sehingga mereka belajar mengembangkan dan mempertahankan visi dan aspirasi mereka serta mengembangkan kemampuan untuk melakukan dialog generatif

Menciptakan pengetahuan kelautan digital dan masyarakat yang mampu belajar

4. Mengembangkan Konsep Pemeliharaan Kelautan

Mengintegrasikan hak properti dengan tanggung jawab pemeliharaan melalui program hak pengguna lokal, sertifikasi, dan pengakuan prakarsa industri

Hanya keseimbangan antara hak masyarakat sipil dan kepemimpinan pemerintah yang lebih kuat yang dapat menghindari risiko penduduk menerima beban berlebih dengan menghalangi masa depan sistem kelautan atau dengan peluang akses dan distribusi manfaat yang tidak memadai akibat intervensi kebijakan yang tidak bijaksana. Pencapaian keseimbangan tersebut memerlukan kesediaan dan kerja sama yang lebih besar, dari masyarakat setempat hingga tindakan nasional dan internasional. Akuntabilitas yang lebih kuat, keterbukaan, dan mekanisme partisipasi juga akan diperlukan untuk menyelesaikan konflik dan memungkinkan pembagian yang adil antarberbagai pengguna, terutama di area yang tidak terjangkau yurisdiksi nasional.



Dibentuk pada September 2018, High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP) merupakan prakarsa unik yang terdiri atas 14 kepala pemerintahan yang sedang menjabat serta negara yang berkomitmen untuk mewujudkan solusi berani dan pragmatis bagi kesehatan serta kekayaan laut yang mendukung Tujuan Perkembangan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDG) serta membangun masa depan yang lebih baik bagi planet ini dan penghuninya. Panel terdiri atas presiden atau perdana menteri Australia, Kanada, Chili, Fiji, Ghana, Indonesia, Jamaika, Jepang, Kenya, Meksiko, Namibia, Norwegia, Palau, dan Portugal, serta didukung oleh Kelompok Pakar, Jaringan Penasihat, dan Sekretariat yang membantu pekerjaan analisis, komunikasi, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Sekretariat berbasis di World Resources Institute.

Dokumen asal ringkasan ini merupakan bentuk penugasan dari HLP sebagai bagian dari serangkaian “Dokumen Spesifikasi Teknis (Blue Paper)” yang menelusuri adanya tantangan mendesak antara laut dan ekonomi. Dokumen Spesifikasi Teknis ini disusun oleh lebih dari 160 pakar terkemuka dunia dari 47 negara. Dokumen meringkas pengetahuan terbaru, dan pemikiran mutakhir tentang solusi kelautan inovatif di bidang teknologi, kebijakan, tata kelola, serta keuangan yang dapat membantu mempercepat peralihan menuju hubungan antara manusia dan laut yang lebih berkelanjutan serta menguntungkan. Dokumen Spesifikasi Teknis akan dirilis secara berkala antara November 2019 dan Juni 2020 serta tersedia dalam bentuk Ringkasan Dokumen Spesifikasi Teknis HLP yang telah diedit sebelum Konferensi Laut PBB di Lisbon pada Juni 2020.

Argumen, temuan, dan rekomendasi yang tercantum dalam Dokumen Spesifikasi Teknis hanya mewakili pandangan penulis. Dokumen Spesifikasi Teknis merupakan masukan independen untuk proses HLP serta tidak mewakili pemikiran HLP, Petugas, ataupun Sekretariat.

Untuk informasi lebih lanjut, termasuk laporan selengkapnya, kunjungi www.oceanpanel.org.

1 Swilling, M., M. Ruckelshaus, T. Brodie Rudolph et al. 2020. *The Ocean Transition: What to Learn from System Transitions*. Washington, DC: World Resources Institute. www.oceanpanel.org/blue-papers/ocean-transition-what-learn-system-transitions